

Kajian Pengembangan Strategi Bidang Kesehatan Kota Bogor



Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Angka kematian ibu, bayi, dan balita masih tinggi, sementara prevalensi stunting pada 2024 mencapai 21,1%, jauh di atas target nasional 14%. Beban penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat, sementara tuberkulosis dan HIV/AIDS tetap menjadi ancaman. Isu kesehatan mental juga semakin menonjol di wilayah perkotaan, ditambah tingginya kasus keracunan makanan yang mencapai 281 kejadian luar biasa pada 2017–2021.

Dengan tantangan yang kompleks dan keterbatasan sumber daya, Pemerintah Kota Bogor perlu menetapkan prioritas agenda kesehatan. SMERU mendukung upaya tersebut melalui kajian yang merumuskan strategi prioritas pengurangan kematian ibu dan bayi baru lahir, pengendalian hipertensi dan diabetes melitus, serta pencegahan depresi. Strategi ini dituangkan dalam rencana aksi tahunan untuk membantu Pemerintah Kota Bogor memetakan intervensi dan kegiatan prioritas secara lebih terarah dan berbasis bukti. [Klik gambar](#) untuk mengetahui studinya lebih lanjut.

Publikasi Terbaru

Buku terbitan Asian Development Bank ini menghimpun pemikiran akademisi terkemuka Indonesia dalam menganalisis tantangan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dua peneliti utama SMERU, Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto menulis bab 14 dan 15 (bersama Zahra Amalia Syarifah) dalam bagian pembangunan manusia dan kesejahteraan. [Klik gambar](#) untuk membaca bukunya.



Bab 14: Addressing Poverty and Inequality for Future Prosperity

Bab ini mengulas kemajuan dan tantangan Indonesia dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Meski angka kemiskinan turun, kesenjangan antarwilayah masih lebar dan garis kemiskinan nasional dinilai belum mencerminkan skala deprivasi sebenarnya. Bab ini menekankan perlunya strategi yang lebih kontekstual, seperti program yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, pendekatan *graduation* di wilayah miskin, serta penguatan modal manusia untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Bab 15: From Safety Net to Springboard: Rethinking Indonesia's Social Protection for Vision 2045

Bab ini mengulas bagaimana perlindungan sosial Indonesia perlu bertransformasi untuk menghadapi tantangan menuju negara berpendapatan tinggi. Dari sekadar jaring pengaman, sistem ini perlu diarahkan menjadi pendorong mobilitas kerja, penguatan modal manusia, dan ketahanan finansial. Bab ini menekankan pentingnya penguatan data sosial, perluasan cakupan, serta keterkaitan antara perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.

Inside SMERU

Pertanyaan

Bagaimana penelitian kualitatif membantu kita memahami isu sosial dan mengungkap hal-hal yang tidak selalu terlihat dalam data statistik?



Dyan Widyaningsih (Iba)
Peneliti

Fenomena sosial tidak selalu bisa dijelaskan dengan angka. Penelitian kualitatif membantu kita memahami *mengapa* dan *bagaimana* sesuatu terjadi melalui pengalaman, cerita, dan konteks nyata yang dialami masyarakat. Pendekatan ini juga relevan untuk isu-isu baru karena dapat memetakan masalah secara mendalam sebelum dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara statistik, bila diperlukan.

SMERU Learning Centre

Pelatihan **Pengantar Evaluasi Dampak**



15-16
APRIL 2026



- ✓ Konsep dan Urgensi Melakukan Evaluasi Dampak
 - ✓ Penyusunan Result Chain (Theory of Change)
 - ✓ Penyusunan Pertanyaan penelitian dan Indikator dalam Evaluasi Dampak
- ... dan lainnya

Selesaikan 20 JP

dapatkan
sertifikat digital



SMERU di Media



Artikel *Mongabay* ini melaporkan bahwa gugatan iklim empat nelayan Pulau Pari terhadap perusahaan semen Holcim telah diterima Pengadilan Kanton Zug di Swiss. Para penggugat menilai emisi perusahaan memperparah kenaikan muka laut, banjir rob, dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Kasus ini berpotensi menjadi preseden penting bagi akuntabilitas korporasi atas dampak krisis iklim. Pada Agustus 2025, Greenpeace Indonesia bersama SMERU juga merilis studi kasus Pulau Pari yang menyimpulkan pulau ini menghadapi krisis iklim dan lingkungan akibat pembangunan eksploitatif serta lemahnya regulasi. [Klik gambar](#) untuk membaca artikelnnya.

Kegiatan



SMERU menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 26 Januari 2026. MoU ini menegaskan



Pada 26 Januari 2026, SMERU turut berpartisipasi dalam diskusi yang diselenggarakan Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono,

komitmen berbagai organisasi masyarakat sipil dalam mendukung KKP memperkuat kapasitas SDM kelautan dan perikanan demi pengelolaan kawasan konservasi laut yang berkelanjutan. Penandatanganan MoU ini melanjutkan kemitraan SMERU dan KKP sejak 2022. Dengan dukungan Agence Française de Développement, SMERU mendorong pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang berorientasi pada aspek ekologis sekaligus mengarusutamakan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

mengenai penguatan peran keimigrasian dalam mendukung pariwisata. Audiensi ini menghimpun pandangan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat layanan keimigrasian yang ramah wisatawan, responsif terhadap dinamika global, sekaligus tetap menjunjung kepentingan nasional. Dalam kesempatan tersebut, SMERU menekankan pentingnya penyempurnaan aturan keimigrasian berbasis riset agar migrasi internasional Indonesia lebih aman, nyaman, dan berpihak pada pelayanan publik.